

**Info Artikel** Diterima Januari 2020  
Disetujui Maret 2020  
Dipublikasikan April 2020

## **ANALISIS *LOCATION QUOTIENT* (LQ) PADI DI KOTA LANGSA**

### **LOCATION QUOTIENT (LQ) OF PADDY IN LANGSA CITY**

**Imas Ameliya, Silvia Anzitha, Faoeza Hafiz Saragih**

**Program Studi Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Samudra Aceh**

**Email: imassaudiliya@gmail.com**

#### **ABSTRACT**

The problem of this research is which sub-district in Langsa City is the Base for Rice Crops. The aim of this research is to identify the Subdistrict which is the base area for Rice Plants in Langsa City. The method used in this research is a survey method based on secondary data. The results showed that the greater the Sub-District rice production compared to the City production, the more likely the area would be a Basis Sub-District. LQ value analysis shows that East Langsa Sub-District, Langsa Lama Sub-District and West Langsa Sub-District are classified as Basis.

*Keywords: Langsa City, Location Quotient, Rice Crops.*

#### **ABSTRAK**

Masalah dari Penelitian ini adalah Kecamatan Manakah di Kota Langsa yang Merupakan daerah Basis untuk Tanaman Padi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Kecamatan yang merupakan daerah basis untuk Tanaman Padi di Kota Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei dengan berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan apabila lebih besar hasil produksi padi Kecamatan di bandingkan produksi Kota maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut menjadi Kecamatan Basis. Analisis nilai LQ menunjukkan Kecamatan Langsa Timur, Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Barat tergolong Basis.

*Kata kunci: Kota Langsa, Location Quotient, Padi.*

#### **PENDAHULUAN**

Menyandang status sebagai negara agraris, namun begitu menyedihkannya kenyataan di lapangan membuktikan bahwa Indonesia masih darurat soal pangan yang berarti tidak tercapainya ketahanan pangan. Sejarah membuktikan bahwa ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (Suryana, 2001; Simatupang et al.,2001). Selain itu, ketahanan pangan dalam arti ketersediaan pangan juga berarti tersedianya pangan yang berkualitas, cukup serta bermutu.

Tanpa adanya pangan yang cukup dan bermutu, maka tidak mungkin dihasilkan sumberdaya manusia yang bermutu.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupan, sehingga pengelolaan tanaman pangan perlu ditingkatkan karena tanaman pangan merupakan kelompok tanaman yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia. Terdapat banyak jenis karbohidrat sebagai salah satu sumber bahan pangan di seluruh dunia, seperti informasi dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang mengatakan bahwa, jenis pangan atau kelompok pangan terdiri dari sembilan bahan makanan dan diklasifikasikan sebagai berikut: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, minuman, bumbu (BKP dalam Rosida, 2011).

Indonesia saat ini memprioritaskan empat jenis tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Hal tersebut terindikasi karena ketersediaan tanaman pangan sangat penting kiranya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertanian pangan dapat dilihat dari program yang dilakukan seperti Upaya Khusus (Upsus) dalam peningkatan produksi pangan yang terfokus di tiga komoditas utama yaitu Padi, Jagung, Kedelai (Pajale), Pengelolaan Tanaman Terpadu. (Jeremy Ponto, 2017).

Isu ketahanan pangan mengemuka sejak tahun 1970-an seiring dengan terjadinya krisis pangan global (Soekirman, 2000). Negara yang penduduknya mengalami kelaparan akibat krisis pangan dianggap tidak mempunyai ketahanan pangan yang mumpuni. Pada tahun 1980-an, ketika krisis pangan sudah mereda, namun ternyata kasus kelaparan masih cenderung meningkat (Foster, 1992; Soekirman, 2000). Persediaan pangan yang cukup secara nasional maupun regional tidak menjamin adanya ketahanan pangan rumah tangga/ individu. Studi Saliem et al. (2001) menunjukkan bahwa walaupun rata-rata ketahanan pangan di tingkat regional (provinsi) tergolong tahan pangan terjamin, namun di provinsi yang bersangkutan masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan dengan proporsi relatif tinggi (Handewi P.S. Rachman, 2005).

Pada tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi beras orang Indonesia mencapai 113,48 kg per kapita per tahun. Walaupun turun dari tahun sebelumnya, yakni 139,15 kg per kapita, konsumsi beras orang Indonesia masih yang tertinggi di dunia. Rata-rata orang Asia mengonsumsi beras 65-70 kg per kapita dan konsumsi beras global tahun 2007 sebanyak 64 kg per kapita (Anonymous, 2012).

Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 menyebut luas lahan baku sawah terus menurun. Catatan mereka ini, luas lahan tinggal 7,1 juta hektar, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektar. Angka luas lahan tersebut diperoleh dengan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) menggunakan data hasil citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan luas lahan tersebut dipicu oleh gencarnya alih fungsi, sehingga fenomena alih fungsi lahan tidak bisa disepelekan lagi. Hal tersebut kemudian mendorong asumsi bahwa

sebagin besar penyebab kemerosotan pangan di Indonesia disebabkan oleh tingginya penurunan luas lahan sawah.

Awal tahun 2019, Kementerian Pertanian menargetkan tahun 2019 menjadi awal perbaikan kehidupan masyarakat khususnya petani, dengan mencanangkan 2019 sebagai tahun perbenihan dan pengentasan kemiskinan berbasis kemiskinan yang berarti upaya peningkatan taraf hidup khususnya bagi petani. Memasuki akhir tahun 2019, Badan Ketahanan Pangan (BKP) mencatat dalam pemetaan nya bahwa 88 Kabupaten di Indonesia Rentan Rawan Pangan dan tersebar di 17 Provinsi yang salah satunya Provinsi Aceh, yang masuk pada kategori Rentan dan Sangat Rentan, yang berarti perlu dilakukannya evaluasi pembangunan pada Provinsi tersebut. Memang tidak mengherankan lagi jika Provinsi ini masih tergolong daerah rentan pangan sebab pasca konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh dahulu, menyebabkan kemerosotan wilayah ini dalam hal penyediaan pangan. Sehingga dalam proses memperbaiki kemerosotan ini, Pemerintah Provinsi Aceh menghimbau untuk meningkatkan produksi pangan di setiap Kabupaten/Kota untuk meningkatkan produksi pangannya terutama komoditi pajale. Kebetulan sejalan pula dengan misi pembangunan pertanian Kota Langsa bahwa tahun 2016, Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) memprioritaskan tujuan pembangunan pertaniannya untuk meningkatkan produksi pangan terutama komoditas padi. Meskipun prioritas pembangunan pertanian nasional meningkatkan produktivitas tanaman padi, jagung dan kedelai (Pajale), namun khusus Kota Langsa lebih fokus pada produksi padi, karena sesuai dengan potensi daerah (Iswahyudi, 2017).

Luas Lahan, Produksi, Produktivitas Tanaman Padi Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2018.

Tabel 1. Sampel Data Pangan Tahun 2018.

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Langsa Timur	1.321	9.357	4,3
2	Langsa Barat	103	678	4,1
3	Langsa Lama	175	811	4,2
4	Langsa Kota	55	311	4,2

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa, 2019.

Dilihat dari data diatas bahwa pemerintah Kota Langsa tengah menjalankan misi peningkatan pangan Kota Langsa dimana dari data tersebut diketahui produksi tertinggi mencapai 9.537 dengan produktivitas 4,3 ton/Ha. Dari berbagai indikasi permasalahan diatas maka Kota Langsa dipilih karena dianggap strategis untuk penerapan analisis *Location Quotient* (LQ) sebagai alat analisis mengenai penentuan komoditi unggulan (basis) dengan menganalisis daerah basis padi di Kota Langsa untuk mendukung program nasional Upsus Pajale pada Musrenbangtan 2019.

Analisis LQ merupakan suatu alat analisis data yang mengkaji kondisi perekonomian sehingga dapat diidentifikasi spesialisasi yang dimiliki oleh suatu

wilayah analisis dibandingkan dengan wilayah referensi. Menurut Hood (1998 dalam Hendayana 2003), menyatakan bahwa *Location Quotient* adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan kelebihan dan keterbatasannya. Masalah dari penelitian ini adalah Kecamatan manakah di Kota Langsa yang merupakan daerah basis untuk tanaman Padi? Tujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi Kecamatan yang merupakan daerah basis untuk tanaman Padi di Kota Langsa.

Dalam penelitian Pangerang (2014) yang berjudul *Analisis Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditi Unggulan Kecamatan Di Kabupaten Maros*, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komoditi yang menjadi basis di setiap Kecamatan berbeda beda. Di Kecamatan Mandai, padi ladang dan padi sawah merupakan komoditi basis ditinjau dari klasifikasi nilai  $LQ > 1$ . Sedangkan di Kecamatan Moncongloe, komoditi tanaman pangan yang merupakan basis adalah ubi kayu, ubi jalar dan jagung. Kemudian di Kecamatan Maros Baru, komoditi kacang hijau, padi sawah, dan ubi jalar menjadi komoditi tanaman yang unggul. Lalu di Kecamatan Marusu, ada komoditi ubi jalar, padi ladang, ubi kayu, dan padi sawah yang unggul. Untuk Kecamatan Surikale, ada kacang hijau dan padi sawah yang basis. Selanjutnya di Kecamatan Lau, kacang hijau dan padi sawah yang menjadi primadonanya. Di Kecamatan Bontoa dan Bantimurung, hanya padi sawah yang basis. Kecamatan Simbang, kedelai dan padi sawah yang menjadi unggulan. Di Kecamatan Tanralili, ada komoditi ubi jalar, ubi kayu, jagung, kedelai dan padi ladang. Dan di Kecamatan Tompobulu ada komoditi padi ladang, jagung, kedelai, ubi kayu, kacang tanah dan ubi jalar yang tergolong basis. Dan terakhir pada Kecamatan Cenrana, hanya ada kacang tanah dan padi sawah yang tergolong basis.

## **BAHAN DAN METODE**

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu peneliti harus menjelaskan secara rinci tentang tahapan dan langkah-langkah penelitian secara runtut, serta mampu menjelaskan keterkaitan antara tahapan yang satu dengan tahapan lainnya secara sistematis dan logis. Pada penelitian deskriptif tidak dilakukan uji terhadap sebuah hipotesis sehingga pada penelitian ini hipotesis tidak ada. Menurut Sugiyono (2017) pendekatan deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain.

### **Lokasi Penelitian**

Daerah penelitian yang diambil adalah Kota Langsa.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Produksi Padi dan Pangan yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa.

### Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Location Quotient (LQ). Analisis Location Quotient (Daryanto dan Hafizrianda, 2010) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{V_{ij}/V_j}{Y_{in}/Y_n}$$

Keterangan:

LQ : Indeks *Location Quotient* komoditi sub sektor tanaman padi pada tingkat Kecamatan i di Kota Langsa

V<sub>ij</sub> : Produksi padi di Kecamatan i Kota Langsa

V<sub>j</sub> : Produksi Pangan di Kecamatan i Kota Langsa

Y<sub>in</sub> : Produksi padi di Kota Langsa.

Y<sub>n</sub> : Produksi Pangan di Kota Langsa.

Indikator:

- LQ>1, artinya komoditi sub sektor tanaman pangan tersebut termasuk komoditi basis. Produksi komoditi sub sektor tanaman pangan tersebut mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan surplusnya dapat dijual ke wilayah lain.
- LQ=1, artinya komoditi tersebut termasuk komoditi basis. Produksi komoditi sub sektor tanaman pangan tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak dapat menjual ke wilayah lain.
- LQ<1, artinya komoditi sub sektor tanaman pangan tersebut termasuk komoditi nonbasis. Produksi komoditi sub sektor tanaman pangan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan kekurangannya dipenuhi dari luar wilayah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Daerah Basis Padi Di Kota Langsa

Tabel 2. Nilai LQ Padi Kota Langsa 2014-2018.

No	Kecamatan	Rata- rata Nilai LQ	Klasifikasi LQ
1	Langsa Timur	1.02	Basis
2	Langsa Barat	1.02	Basis
3	Langsa Lama	1.02	Basis
4	Langsa Kota	0.75	Non Basis
5	Langsa Baro	-	Non Basis

Sumber: Data diolah, 2020.

Di Kota Langsa terdapat lima kecamatan, yang mana dari ke lima kecamatan tersebut hanya 4 kecamatan yang digunakan untuk budidaya yaitu Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Kota. Berdasarkan informasi dan data dari Dinas Pertanian Kota Langsa, Kecamatan Langsa Baro tidak melakukan budidaya padi karena mayoritas masyarakat Langsa Baro tidak bekerja pada sektor pertanian (padi) melainkan bekerja pada sektor jasa.

Oleh sebab itu hanya empat kecamatan yang menjadi sampel dalam olah data. Adapun 4 kecamatan tersebut meliputi, Kecamatan Langsa Timur dengan jumlah produksinya yang tinggi, yang mana Desa Alue Merbau menjadi daerah di Kecamatan Langsa Timur yang menghasilkan produksi tertinggi karena desa tersebut termasuk desa dengan lahan sawah irigasi. Kecamatan Langsa Lama yang juga tergolong basis untuk budidaya padi walaupun kini oleh masyarakat lebih di peruntukkan untuk sektor perkebunan. Kemudian, Kecamatan Langsa Barat yang juga merupakan kecamatan basis untuk budidaya padi walaupun masyarakat Kecamatan Langsa Barat tengah fokus pada budidaya ternak dan perkebunan. Terakhir, Kecamatan Langsa Kota yang merupakan daerah non basis untuk budidaya padi karena kecamatan ini sebenarnya sudah tidak potensial untuk budidaya padi akan tetapi masih memiliki sedikit lahan untuk budidaya oleh sebab itu digunakan untuk sampel dalam olah data. Kecamatan Langsa Kota kini mayoritas masyarakat nya mulai membudidayakan tanaman kehutanan seperti Jabon, kecamatan ini pula di dominasi oleh sektor perdagangan dan industri yang mana hal tersebut menjadikan daerah ini sebagai pusat ekonomi Kota Langsa.

Dari empat kecamatan yang diteliti, maka kecamatan yang potensial adalah Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Barat karena sebagian besar masyarakat kecamatan di tiga kecamatan ini lah yang masih konsisten berusaha tani padi dan karena walaupun luas lahan, produktivitas dan produksinya menurun akan tetapi masih bisa mencukupi kebutuhan wilayahnya terlebih jika dilakukannya intensifikasi. Sehingga, Kecamatan Langsa Kota dan Langsa Baro tidak potensial untuk budidaya padi karena masyarakatnya yang telah beralih profesi dan mengalihfungsikan lahannya terlebih dilihat dari isi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa bahwa Kecamatan Langsa Kota memang diperuntukkan untuk kawasan pemukiman.

Sehingga sebaiknya pemerintah Kota Langsa memfokuskan kepada Kecamatan Langsa Timur sebagai kecamatan prioritas program Upsus Pajale khususnya padi kemudian tanpa mengenyampingkan Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Barat untuk dijadikan daerah basis atau mendukung Kecamatan Langsa Timur sebagai daerah basis padi juga dengan menerbitkan peraturan Walikota untuk daerah khusus padi atau membuat kebijakan tentang konversi lahan di Kota Langsa untuk ketersediaan padi kedepannya sebab sebagaimana pun masyarakat tani Kota Langsa mengupayakan intensifikasi sebaik mungkin, akan tetapi jika tidak di dukung dengan adanya kebijakan maka hal tersebut tidak menolak kemungkinan kedepannya Kota Langsa akan menjadi daerah Rawan Pangan mengingat tingginya tingkat alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Langsa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Analisis Location Quotient (LQ) dapat disimpulkan bahwa :

- a) Teridentifikasi Kecamatan Langsa Timur, Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Barat merupakan Kecamatan Basis Padi di Kota Langsa dengan prioritas pengembangan padi di Kecamatan Langsa Timur.

- b) Teridentifikasi maraknya konversi lahan di Kota Langsa menyebabkan produksi padi menurun.

### **SARAN**

Diharapkan kepada pihak pemerintah Kota Langsa untuk membuat kebijakan mengenai alih fungsi (konversi) lahan menerbitkan peraturan Walikota untuk daerah khusus padi serta mengoptimalkan penggunaan lahan sawah yang ada di Kota Langsa seperti meningkatkan penerapan intensifikasi lahan dan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan produksi padi seperti pembangunan sarana irigasi, subsidi benih, pupuk, dan pestisida, kredit usahatani bersubsidi, serta pembinaan kelembagaan usaha tani karena dikhawatirkan dengan semakin berkembangnya industri di Kota Langsa yang menyebabkan maraknya alih fungsi lahan sawah dan alih profesi-nya masyarakat tani akan memberi dampak merosotnya produksi padi di Kota Langsa yang di khawatirkan di beberapa tahun kedepan Kota Langsa tidak mampu memenuhi kebutuhan padi daerah nya dan harus memasok padi dari luar daerah padahal daerahnya terbilang potensial untuk budidaya padi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonimous. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi*. <http://www.e-dukasi.net/index> : Diakses pada tanggal 23 Juni 2012.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kota Langsa Dalam Angka Tahun 2014. Pemerintahan Kota Langsa*, Langsa.
- (2015). *Kota Langsa Dalam Angka Tahun 2015. Pemerintahan Kota Langsa*, Langsa.
- (2016). *Kota Langsa Dalam Angka Tahun 2016. Pemerintahan Kota Langsa*, Langsa.
- (2017). *Kota Langsa Dalam Angka tahun 2017. Pemerintahan Kota Langsa*, Langsa.
- (2018). *Kota Langsa Dalam Angka Tahun 2018. Pemerintahan Kota Langsa*, Langsa.
- Daryanto, Arief dan Yundy Hafizrianda . (2010). *Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Konsep dan Aplikasi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Handayana, R. (2003). Analisis Location Quotient Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Jurnal Informatika Pertanian Volume 12. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor*.

- Handewi P.S. Rachman, A. P. (2005). Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog. *FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI Volume 23 No. 2, Desember 2005 : 73 - 83, 73-83.*
- Iswahyudi. (2017). Konversi Lahan Sawah b Berbasis Perubahan Penutup Lahan Citra Multiwaktu di Kota Langsa. *https://www.ejurnalunsam.id*, 245-254.
- Jeremy Ponto, N. M. (2017). Upsus Pajale Dalam Menunjang Program Swasembada Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907-4298 , Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017 : 253-260, 253-260.*
- Pangerang. (2014). Analisis Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditi Unggulan Kecamatan di Kabupaten Maros. *Agronomi Pertanian BPP Maros.*
- Rosida. (2011). *Konsumsi Pangan Keluarga dan Pola Pangan Harapan (PPH) di Desa Kampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.*
- Saliem, H.P. M. Ariani, Y. Marisa, T.B. Purwantini dan E.M. Lokollo. . (2001). *(Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga dan Regional. Bogor: Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.*
- Soekirman. (2000). *Beberapa Catatan Mengenai Konsep Ketahanan Pangan.* Jakarta: Badan Ketahanan Pangan.
- Suryana, A. (2001). *Tantangan dan Kebijakan Ketahanan Pangan.* Jakarta: Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Pemulihan Ekonomi. Departemen Pertanian.